



Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia : Perspektif Sosiologi Ekonomis

Ahmad Sukron¹

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

May Naila Khoiroh²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

, Korespondensi penulis: ahmad.sukron@uingusdur.ac.id,

Abstract : This study examines social and economic inequality in Indonesia through the lens of economic sociology using a literature review approach. The analysis reveals that inequality is a multidimensional phenomenon rooted in the structural interaction between the economy, social hierarchy, and public policy. From a sociological-economic perspective, inequality is not merely a result of uneven income distribution but a manifestation of the institutionalized social structure that privileges certain groups with greater economic, cultural, and social capital. The study also finds that current development policies in Indonesia tend to emphasize economic growth rather than equitable distribution, thereby reinforcing systemic disparities between social classes. Furthermore, the study highlights that welfare cannot be achieved solely through economic expansion without integrating social values such as solidarity, justice, and inclusivity. Economic sociology offers a comprehensive analytical framework that bridges the relationship between the market and society, emphasizing the importance of ethical and social dimensions in policy formulation. The findings suggest that sustainable social welfare requires structural reform, equitable access to education and health, and the revitalization of social solidarity within communities. In conclusion, achieving inclusive development in Indonesia demands not only economic efficiency but also the reinforcement of social justice and collective responsibility.

Keywords: Economic sociology, social inequality, social welfare, inclusive development, Indonesia

Abstrak : Studi ini meneliti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia melalui lensa sosiologi ekonomi menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Analisis mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan adalah fenomena multidimensional yang berakar pada interaksi struktural antara ekonomi, hierarki sosial, dan kebijakan publik. Dari perspektif sosiologis-ekonomi, ketidaksetaraan bukan hanya hasil dari distribusi pendapatan yang tidak merata, tetapi juga manifestasi dari struktur sosial yang terinstitusionalisasi yang memberikan hak istimewa kepada kelompok-kelompok tertentu dengan modal ekonomi, budaya, dan sosial yang lebih besar. Studi ini juga menemukan bahwa kebijakan pembangunan saat ini di Indonesia cenderung menekankan pertumbuhan ekonomi daripada distribusi yang adil, sehingga memperkuat kesenjangan sistemik antar kelas sosial. Lebih lanjut, studi ini menyoroti bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui ekspansi ekonomi tanpa mengintegrasikan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, keadilan, dan inklusivitas. Sosiologi ekonomi menawarkan kerangka analitis komprehensif yang menjembatani hubungan antara pasar dan masyarakat, menekankan pentingnya dimensi etika dan sosial dalam perumusan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial yang berkelanjutan membutuhkan reformasi struktural, akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan, dan revitalisasi solidaritas sosial di dalam masyarakat. Kesimpulannya, pencapaian pembangunan inklusif di Indonesia tidak hanya membutuhkan efisiensi ekonomi, tetapi juga penguatan keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif.

Kata kunci: Sosiologi ekonomi, ketidaksetaraan sosial, kesejahteraan sosial, pembangunan inklusif, Indonesia

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi salah satu tantangan paling serius dalam pembangunan di Indonesia. Meski secara makroekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang

Received Oktober 30, 2025; Revised November 30, 2025; Desember 25, 2025

* Ahmad Sukron, ahmad.sukron@uingusdur.ac.id

Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia : Perspektif Sosiologi Ekonomis

stabil dalam dua dekade terakhir, tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Fenomena ini tercermin dari indeks Gini yang masih berkisar antara 0,37– 0,39, menandakan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup lebar antara kelompok kaya dan miskin (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga dengan dimensi sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh lapisan sosial.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, ketimpangan sosial bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga hasil dari interaksi antara struktur sosial, kebijakan publik, dan nilai-nilai budaya yang membentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat. Sosiologi ekonomi menekankan bahwa aktivitas ekonomi selalu tertanam (*embedded*) dalam struktur sosial yang lebih luas, di mana hubungan sosial, jaringan kekuasaan, dan institusi ekonomi saling memengaruhi (Granovetter, 1985). Dengan demikian, memahami ketimpangan di Indonesia memerlukan pendekatan multidisipliner yang melihat ekonomi tidak hanya sebagai sistem pasar, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan distribusi kekuasaan dan legitimasi sosial (Bourdieu, 1986; Weber, 1947).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan sosial- ekonomi di Indonesia bersifat sistemik dan berakar pada struktur sosial yang timpang. Hababil (2024) menegaskan bahwa kelas sosial ekonomi atas cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja, sementara kelompok bawah mengalami keterbatasan struktural untuk meningkatkan mobilitas sosial. Ketimpangan tersebut juga diperkuat oleh kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada pemerataan, seperti subsidi dan insentif fiskal yang lebih banyak dinikmati oleh pelaku ekonomi besar (Raharjo & Siregar, 2023). Sementara itu, dimensi sosial seperti budaya konsumtif, lemahnya solidaritas sosial, dan menurunnya nilai gotong royong turut memperdalam kesenjangan sosial di tingkat komunitas (Sulaiman, 2023).

Dalam konteks inilah, pendekatan sosiologi ekonomi menjadi penting untuk menganalisis ketimpangan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana hubungan antara ekonomi dan masyarakat membentuk pola distribusi kesejahteraan, serta bagaimana kebijakan ekonomi dapat berkontribusi terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia melalui tinjauan literatur, dengan menekankan interaksi antara struktur sosial, kebijakan ekonomi, dan nilai-nilai sosial sebagai faktor kunci dalam pembentukan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori dan Konsep Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi berangkat dari pandangan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial tempatnya berlangsung. Granovetter (1985) memperkenalkan konsep *embeddedness*, yang menekankan bahwa tindakan ekonomi selalu tertanam dalam jaringan sosial dan dipengaruhi oleh norma, kepercayaan, serta hubungan sosial. Pandangan ini menolak anggapan ekonomi sebagai sistem rasional yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang saling bergantung pada konteks sosial. Bourdieu (1986) menambahkan bahwa dalam masyarakat modern, struktur sosial terbentuk melalui distribusi modal—baik modal ekonomi, sosial, maupun budaya—yang menentukan posisi individu dalam hierarki sosial. Sementara itu,

Weber (1947) melalui konsep ethic of responsibility menjelaskan bahwa tindakan ekonomi yang etis dapat membentuk struktur sosial yang lebih adil, dengan menekankan tanggung jawab moral dalam praktik ekonomi. Ketiga teori ini memberikan dasar kuat untuk memahami bagaimana ketimpangan muncul dari interaksi antara ekonomi, sosial, dan nilai-nilai kultural dalam masyarakat.

2. Konsep Ketimpangan Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Ketimpangan sosial merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan mencolok dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi, ketimpangan sering diukur menggunakan indikator seperti Indeks Gini, distribusi pendapatan, dan akses terhadap pelayanan publik (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Namun, dari sudut pandang sosiologi ekonomi, ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga struktur sosial yang mengatur akses terhadap modal sosial dan budaya (Smelser & Swedberg, 2010). Di sisi lain, kesejahteraan sosial mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekadar kesejahteraan material. Menurut Sen (1999), kesejahteraan ditentukan oleh kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, pembangunan sosial yang sejati menuntut pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hak sosial lainnya.

3. Penelitian Terdahulu dan Konteks Indonesia

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia bersifat struktural dan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang tidak merata. Raharjo dan Siregar (2023) menemukan bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan sering kali memperkuat dominasi kelas ekonomi atas, sehingga menciptakan polarisasi sosial di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hababil (2024) menguatkan pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa kesenjangan akses terhadap pendidikan dan modal menjadi akar utama sulitnya mobilitas sosial di Indonesia. Sementara itu, Sulaiman (2023) menyoroti pentingnya dimensi etika dan solidaritas sosial dalam mengurangi ketimpangan, karena kemajuan ekonomi tanpa nilai sosial akan memperdalam jurang sosial antar kelas. Artikel Kompasiana (2024) juga menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang berfokus pada pemerataan kesempatan ekonomi dan peningkatan akses terhadap kesejahteraan sosial berbasis komunitas. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa pendekatan sosiologi ekonomi relevan untuk memahami ketimpangan di Indonesia karena mampu menjembatani aspek ekonomi dan sosial dalam satu kerangka analisis yang holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena ketimpangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia, dalam perspektif sosiologi ekonomi.

Menurut Sarwono (2006), studi literatur merupakan kegiatan menelaah berbagai sumber ilmiah, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang relevan, guna memperoleh dasar teori dan temuan empiris yang dapat mendukung analisis suatu masalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi berfokus pada analisis konseptual dan sintesis dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Tahapan penelitian ini

Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia : Perspektif Sosiologi Ekonomis

terdiri atas beberapa langkah, yaitu:

- a) Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku teks sosiologi ekonomi, laporan lembaga riset, serta artikel kebijakan sosial-ekonomi yang relevan dengan tema ketimpangan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemilihan sumber didasarkan pada tingkat relevansi, kredibilitas, dan aktualitas publikasi (minimal lima tahun terakhir).
- b) Analisis data literatur, menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) yang meliputi tiga tahapan:
 - a) Reduksi data, yaitu menyeleksi informasi penting dari berbagai literatur dengan menyingkirkan data yang tidak relevan.
 - b) Penyajian data, berupa pengorganisasian hasil bacaan dalam bentuk narasi tematik yang menjelaskan hubungan antara teori sosiologi ekonomi, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial.
 - c) Penarikan kesimpulan, yakni melakukan interpretasi kritis untuk menemukan pola dan implikasi sosial-ekonomi yang muncul dari hasil kajian.

Melalui metode studi literatur ini, penelitian berupaya menyajikan analisis teoritis yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi terbentuk, bagaimana ia memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat, serta bagaimana perspektif sosiologi ekonomi dapat digunakan untuk memahami dan menawarkan alternatif solusinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pola Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dari distribusi pendapatan, tetapi juga dari kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik. Secara struktural, ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalistik yang masih berorientasi pada pertumbuhan, bukan pemerataan. Menurut Hababil (2024), dominasi kelas ekonomi atas dalam struktur masyarakat menyebabkan terjadinya disparitas sosial yang menumpuk di wilayah perkotaan, sementara kelompok menengah ke bawah di pedesaan cenderung terpinggirkan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif terhadap kelompok rentan dan marjinal.

Selain faktor ekonomi, dimensi sosial juga memainkan peran penting dalam memperkuat ketimpangan. Pola konsumsi, budaya status, dan akses sosial yang timpang menjadi refleksi dari reproduksi ketimpangan antargolongan. Dalam konteks ini, teori sosiologi ekonomi menjelaskan bahwa ketimpangan bukan sekadar akibat dari distribusi sumber daya yang tidak merata, tetapi juga hasil dari struktur sosial yang melembaga melalui norma, jaringan, dan kebijakan publik (Granovetter, 1985; Bourdieu, 1986). Kelas sosial dengan modal ekonomi dan sosial yang kuat mampu mempertahankan posisi dominan melalui akses politik dan jaringan ekonomi yang saling memperkuat. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan cenderung bersifat sistemik dan sulit diurai hanya dengan kebijakan redistribusi ekonomi semata.

Data empiris menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks Gini Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan pada kisaran 0,37–0,39, yang

menunjukkan adanya jurang pendapatan antara kelompok atas dan bawah yang belum banyak berubah. Artikel Kompasiana (2024) mencatat bahwa ketimpangan paling mencolok terjadi di sektor kepemilikan aset dan akses lapangan kerja formal. Masyarakat dengan pendidikan tinggi dan keterampilan tertentu memiliki peluang ekonomi yang jauh lebih besar dibanding kelompok pekerja informal, terutama di wilayah non- perkotaan. Ketimpangan spasial ini turut memperkuat polarisasi sosial di tingkat nasional.

Dari perspektif kebijakan, upaya pemerintah melalui program perlindungan sosial dan bantuan tunai memang membantu menekan dampak jangka pendek ketimpangan, namun belum menyentuh akar strukturalnya. Seperti disampaikan dalam penelitian Raharjo dan Siregar (2023), pendekatan kebijakan yang bersifat charity-based belum cukup efektif tanpa disertai reformasi struktural dalam sistem pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemerataan investasi. Pendekatan sosiologi ekonomi menekankan pentingnya sinergi antara dimensi ekonomi dan sosial agar kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Dengan demikian, ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia perlu dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antara struktur ekonomi, relasi sosial, dan kebijakan publik yang belum seimbang dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

b. Perspektif Sosiologi Ekonomi dalam Menjelaskan Ketimpangan

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, ketimpangan sosial-ekonomi tidak hanya dilihat sebagai ketidakseimbangan distribusi sumber daya material, tetapi juga sebagai hasil dari relasi sosial dan struktur kekuasaan yang melekat dalam sistem ekonomi. Sosiologi ekonomi memandang ekonomi sebagai bagian yang tertanam (embedded) dalam jaringan sosial, budaya, dan institusional (Granovetter, 1985). Oleh karena itu, analisis ketimpangan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Hubungan antara modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Bourdieu (1986), menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi sangat ditentukan oleh posisi sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Masyarakat dengan modal sosial yang kuat lebih mudah memperoleh peluang ekonomi, sementara kelompok yang terpinggirkan cenderung tetap berada dalam siklus kemiskinan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Sulaiman (2023) dalam Jurnal Ilmu Islam dan Sosial menegaskan bahwa ketimpangan di Indonesia juga terkait dengan nilai-nilai sosial dan etika ekonomi masyarakat. Pola konsumsi yang berlebihan di kalangan menengah ke atas serta lemahnya solidaritas sosial antar kelas menjadi faktor kultural yang memperkuat ketimpangan. Dalam konteks ini, sosiologi ekonomi membantu mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa penguatan nilai sosial akan melahirkan pembangunan yang tidak inklusif. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Weber (1947) tentang ethic of responsibility, bahwa kemajuan ekonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk mencegah munculnya dominasi ekonomi yang eksplotatif. Selain itu, intervensi kebijakan publik dalam mengatasi ketimpangan sering kali tidak memperhatikan dimensi sosial dari kebijakan ekonomi. Raharjo dan Siregar (2023) menyoroti bahwa kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia masih berorientasi pada stabilitas makroekonomi tanpa memperhatikan distribusi sosial dari manfaat kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan pembangunan cenderung memperkuat kelompok elit ekonomi yang sudah mapan. Sosiologi ekonomi menawarkan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dengan mengaitkan aspek struktural, kultural, dan institusional, sehingga ketimpangan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor ekonomi dan relasi sosial yang kompleks. Pendekatan ini mengajak pembuat kebijakan untuk tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang menopang keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia : Perspektif Sosiologi Ekonomis

c. Relasi antara Struktur Sosial, Kebijakan Ekonomi, dan Kesejahteraan.

Kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita atau pertumbuhan PDB, melainkan juga oleh struktur sosial yang mempengaruhi distribusi manfaat pembangunan. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kebijakan ekonomi sering kali menghasilkan efek yang berbeda bagi tiap lapisan sosial karena adanya perbedaan posisi dan akses terhadap sumber daya (Smelser & Swedberg, 2010). Struktur sosial yang hierarkis menciptakan peluang yang tidak merata, di mana kelompok dengan modal sosial, ekonomi, dan politik yang kuat mampu memanfaatkan kebijakan pembangunan untuk memperluas dominasi mereka. Hal ini menjelaskan mengapa program pembangunan ekonomi sering gagal menurunkan ketimpangan secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Raharjo dan Siregar (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi di Indonesia masih menghadapi masalah koordinasi antarsektor dan lemahnya basis sosial. Kebijakan fiskal dan moneter yang berfokus pada stabilitas makroekonomi sering kali tidak diiringi dengan kebijakan sosial yang memadai, sehingga manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata. Dalam konteks ini, sosiologi ekonomi berperan penting dalam menyoroti hubungan antara kebijakan ekonomi dan struktur sosial yang mendasarinya. Misalnya, sistem pajak dan subsidi yang tidak proporsional dapat memperkuat posisi kelas menengah ke atas, sementara kelompok miskin tetap berada dalam kondisi rentan. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi merupakan manifestasi dari relasi kekuasaan dalam masyarakat (Hababil, 2024).

Selain itu, dimensi sosial seperti pendidikan, budaya kerja, dan solidaritas sosial turut menentukan efektivitas kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sulaiman (2023) menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui pertumbuhan ekonomi tanpa disertai pembangunan moral dan sosial. Ketika masyarakat kehilangan nilai solidaritas dan gotong royong, ketimpangan cenderung meningkat karena orientasi ekonomi bergeser pada kepentingan individual. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial menjadi syarat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Pemerintah perlu menempatkan dimensi sosial sebagai fondasi dalam setiap perumusan kebijakan ekonomi agar hasil pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

d. Faktor Penyebab dan Solusi Struktural

Berdasarkan berbagai kajian literatur, ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia memiliki akar yang bersifat struktural, historis, dan kultural. Secara struktural, sistem ekonomi nasional masih didominasi oleh logika kapitalisme yang berorientasi pada pertumbuhan, bukan pemerataan (Hababil, 2024). Hal ini menciptakan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok elit ekonomi dan memperlebar jurang sosial antara kelas atas dan kelas bawah. Sementara itu, dari sisi historis, warisan kolonialisme turut meninggalkan pola kepemilikan aset dan tanah yang tidak merata, yang kemudian direproduksi melalui kebijakan ekonomi modern (Raharjo & Siregar, 2023). Dalam konteks ini, ketimpangan bukan sekadar hasil dari ketidakefisienan ekonomi, melainkan manifestasi dari struktur kekuasaan yang melembaga dalam sistem sosial.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, ketimpangan juga diperkuat oleh ketidakseimbangan modal sosial dan budaya antar kelompok masyarakat. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa individu dengan modal sosial dan budaya yang tinggi memiliki kemampuan untuk mengakses peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Ketika modal sosial dan budaya terkonsentrasi

pada kelompok tertentu, reproduksi sosial terjadi dan memperkuat struktur ketimpangan yang ada. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulaiman (2023), yang menegaskan bahwa rendahnya kesadaran sosial dan melemahnya nilai solidaritas di tingkat komunitas memperburuk kesenjangan kesejahteraan. Artinya, ketimpangan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi semata, tetapi perlu dilihat sebagai proses sosial yang saling terkait antara kebijakan, nilai, dan struktur masyarakat.

Dalam literatur lain, solusi terhadap ketimpangan menekankan pentingnya reformasi struktural yang berpihak pada pemerataan. Kompasiana (2024) menyarankan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan akses pendidikan, pemerataan kesempatan kerja, dan perlindungan sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini konsisten dengan pandangan Weber (1947) yang menekankan peran etika dan rasionalitas dalam tindakan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Selain itu, Smelser dan Swedberg (2010) menekankan pentingnya intervensi kelembagaan yang memastikan sistem ekonomi berjalan selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, solusi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia menuntut perubahan paradigma dari pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan sosial yang berkeadilan dan inklusif.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia merupakan hasil interaksi antara struktur ekonomi yang timpang, kebijakan publik yang belum berpihak pada pemerataan, serta lemahnya integrasi nilai sosial dalam pembangunan. Upaya mengatasi ketimpangan memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan perbaikan sistem pendidikan, redistribusi aset, serta penguatan nilai solidaritas sosial. Sosiologi ekonomi memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami kompleksitas ini, sekaligus menawarkan perspektif transformatif yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial- ekonomi di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh interaksi antara struktur ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Sistem ekonomi nasional yang masih berorientasi pada pertumbuhan tanpa pemerataan telah menciptakan kesenjangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Perspektif sosiologi ekonomi menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan distribusi pendapatan, tetapi juga oleh struktur sosial yang melembaga melalui kepemilikan modal sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak seimbang (Bourdieu, 1986; Granovetter, 1985). Ketimpangan yang bersifat sistemik ini kemudian diperkuat oleh kebijakan ekonomi yang cenderung berpihak pada kelompok elit, sementara masyarakat lapisan bawah tetap terperangkap dalam keterbatasan struktural (Raharjo & Siregar, 2023).

Kesejahteraan sosial di Indonesia juga belum merata karena pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan nilai keadilan sosial. Program pemerintah yang bersifat bantuan langsung memang dapat mengurangi dampak jangka pendek dari ketimpangan, tetapi tidak menyentuh akar permasalahan yang bersifat struktural. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi ekonomi penting digunakan untuk memahami hubungan antara ekonomi dan masyarakat secara lebih mendalam, agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

***Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia :
Perspektif Sosiologi Ekonomis***

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan ketimpangan dan distribusi pendapatan Indonesia. Jakarta: BPS.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Habil, M. P. (2024). Analisis Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia [Manuskrip tidak diterbitkan].
- Kompasiana. (2024). Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Indonesia: Indikator Utama dan Solusi Kebijakan. <https://share.google/KJkYYfwO4xd0TUWW2>
- Raharjo, A., & Siregar, M. (2023). Pembangunan Inklusif dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi dan Ekonomi Pembangunan*, 4(3), 426–445.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Smelser, N. J., & Swedberg, R. (2010). *The handbook of economic sociology* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2023). Etika Ekonomi dan Ketimpangan Sosial di Indonesia: Perspektif Sosiologi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Islam dan Sosial*, 16(1), 170–178.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.